



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 105/M.PPN/HK/08/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRA-EVALUASI AKHIR PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020–2024**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu dilakukan evaluasi akhir pada tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yakni pada tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pra-evaluasi akhir pada tahun 2023 sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan evaluasi akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pra-Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pra-Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRA-EVALUASI AKHIR PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pra-Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pra-Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

terdiri ...

terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, serta memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan, melaksanakan arahan dari Tim Pengarah, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. merumuskan konsep metode evaluasi yang akan digunakan dalam Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- b. menyusun konsep instrumen Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. menyusun konsep panduan teknis pelaksanaan Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. melakukan *exercises* analisis Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- e. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait; dan
- f. menyusun laporan Pra-Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, didukung oleh Kelompok Kerja yang terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Sasaran Makro Pembangunan;
- b. Kelompok Kerja Agenda Pembangunan 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”;
- c. Kelompok Kerja Agenda Pembangunan 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”;
- d. Kelompok Kerja Agenda Pembangunan 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”;

e. Kelompok ...

- e. Kelompok Kerja Agenda Pembangunan 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”;
- f. Kelompok Kerja Agenda Pembangunan 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”;
- g. Kelompok Kerja Agenda Pembangunan 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”; dan
- h. Kelompok Kerja Agenda Pembangunan 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

KETUJUH : Kelompok Kerja huruf a sampai dengan huruf h sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan konsolidasi data dan informasi kebutuhan evaluasi kinerja Agenda Pembangunan dan *Major Project*;
- b. melakukan *exercise* evaluasi pada topik terpilih terkait *Food Estate*, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, *Stunting*, Kawasan Industri, dan Destinasi Pariwisata Prioritas dalam mendukung pencapaian Agenda Pembangunan dan *Major Project*; dan
- c. memberikan masukan dan sinkronisasi atas metode, instrumen, dan panduan teknis Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pra-Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.105/M.PPN/HK/08/2023
TANGGAL 9 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PRA-EVALUASI AKHIR PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020–2024

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas; dan
10. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG ...

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Inda Monita, S.E., MPM., Kementerian PPN/Bappenas;
12. Meitha Ika Pratiwi, S.P., MBA., Kementerian PPN/Bappenas;
13. Tini Partini Nuryawani, S.Si., MDEC., Kementerian PPN/Bappenas;

14. Anna Nur Rahmawaty, S.E., MA.,
Kementerian PPN/Bappenas;
 15. Jessica Andrea Shinta, S.Ak., Kementerian
PPN/Bappenas; dan
 16. Mohammad Riziq Syihab, S.P.W.K.,
Kementerian PPN/Bappenas.
1. Kelompok Kerja Evaluasi Sasaran Makro Pembangunan;
- Ketua merangkap Anggota : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis
Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
- Anggota : 1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perdagangan, Investasi dan
Kerjasama Ekonomi Internasional,
Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN/Bappenas;
 5. Direktur Kependudukan dan Jaminan
Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian
PPN/Bappenas;
 7. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian
PPN/Bappenas;
 8. Direktur Keuangan Negara dan Analisis
Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN,
Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;
 11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Perdagangan;
 12. Kepala Biro Bina Program, Badan Pusat
Statistik;
 13. Eko Supriyatno, Kementerian
PPN/Bappenas; dan
 14. Karsinah, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 1
“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

Berkeadilan”

Ketua merangkap Anggota : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;

- Anggota :
1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 15. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian

Koordinator ...

- Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan;
 17. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 18. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian;
 19. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Kementerian Investasi/BKPM;
 20. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
 21. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 22. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan SDM Aparatur, Kementerian Koperasi dan UKM;
 23. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas;
 24. Ir. Bambang Triyono, Kementerian PPN/Bappenas;
 25. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos., MA., Kementerian PPN/Bappenas; dan
 26. Sinta Paramita, S.T., M.T.I., Kementerian PPN/Bappenas.
3. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”
- Ketua merangkap Anggota : Direktur Tata Ruang, Pertahanan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
- Anggota : 1. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri;
 8. Dr. Ir. Budhi Santoso, MA., Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Heriyadi, S.Sos., MT., MSc., Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Andi Setyo Pambudi, S.T, M.Si., Kementerian PPN/Bappenas; dan
 11. Novi Mulia Ayu, S.E., MDEC., Kementerian PPN/Bappenas.
4. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
- Ketua merangkap Anggota : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
- Anggota : 1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,

- Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial;
 11. Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
 12. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 13. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 14. Grace Second Lady Manalu, S.E., Kementerian PPN/Bappenas; dan
 15. Sigit Santoso, S.Pd., M.Pd., Kementerian PPN/Bappenas.
5. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”
- Ketua merangkap Anggota : Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- Anggota :
1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama;
 6. Afwandi, S.E., Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Indra Wisaksono, S.E., MPP, Kementerian PPN/Bappenas; dan
 8. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, S.T., MPP., Kementerian PPN/Bappenas.
6. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”

Ketua merangkap Anggota : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;

- Anggota :
1. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
 10. Rahmat Hidayat, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Ladislaus Ryanniro Tumanggor, S.T., Kementerian PPN/Bappenas; dan
 12. Chairul Rijal, S.E., MAP., MIDS., Kementerian PPN/Bappenas.

7. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”

Ketua merangkap Anggota : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;

- Anggota :
1. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Kelautan dan Perikanan,

Kementerian ...

- Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 10. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 11. Kepala Biro Perencanaan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 12. Andreas Rudika Ardiyanto, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Ultamas Eka Rahmawan, S.T., Kementerian PPN/Bappenas; dan
 14. Nawang Anandhini, S.PWK., Kementerian PPN/Bappenas.
8. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 7 "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik"
- Ketua merangkap Anggota : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
- Anggota : 1. Direktur Politik, dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri;
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Kepala Biro Kebijakan Strategis, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Prakosa Grahayudiandono, S.E., MPA., Kementerian PPN/Bappenas;
12. Nuzula Anggeraini, S.STP., M.PS., M.URP., Kementerian PPN/Bappenas;
13. Yulia Agnis Sutarno, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas; dan
14. Amelia Ari Putri, S.K.Pm., Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati